

RESISTENSI GERAKAN MAHASISWA TERHADAP KOMERSIALISASI PENDIDIKAN (STUDI KASUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FISIP DAN TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN, KALIMANTAN TIMUR 2019-2020)

Vincent Siduppa¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Badan Eksekutif Mahasiswa tentang pemahaman dan langkah-langkah resistensi terhadap Komersialisasi pendidikan yang hari ini dirasakan oleh mahasiswa Fisip dan Teknik untuk mengetahui seberapa optimal Badan Eksekutif Mahasiswa dalam meresistensi komersialisasi pendidikan di Fakultas Fisip dan Fakultas Teknik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan gerakan resistensi yang dilakukan oleh mahasiswa BEM FISIP dan BEM TEKNIK Periode tahun 2019-2020 telah terlaksana, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal yang bisa dilihat dari beberapa masalah yang muncul seperti Covid-19, kampus yang di tutup mengakibatkan: Gerakan mahasiswa yang ada tidak lepas dari bagaimana para senior terdahulu berperan mahasiswa dari generasi ke generasi untuk membantu membangun kesadaran perlawanan atas kebijakan yang ada. Generasi terdahulu dapat menjadi tolak ukur untuk membangun gerakan perlawanan. Dalam membangun eskalasi gerakan di Universitas Mulawarman BEM FISIP dan BEM TEKNIK tergabung dalam Aliansi Unmul Gawat Darurat dan Aliansi Nasional Mahasiswa dikampus yang lain. Gerakan Mahasiswa yang di inisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik dan FISIP merupakan salah satu contoh bagaimana salah satu subjek mahasiswa dan gerakan mahasiswa tetap akan membentuk subjek lain dari mahasiswa untuk membangun gerakan mahasiswa yang terintegrasi satu sama lain. Fase dalam membangun gerakan antara BEM FISIP dan BEM TEKNIK secara teoritis dan praktek hampir sama yang membedakan hanya kuantitas massa. Faktor pendukung dan penghambat dalam membangun eskalasi gerakan BEM FISIP dan BEM TEKNIK secara garis besar sama mulai dari birokrasi tidak memberikan jalan keluar ditambah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan yang dinilai juga tidak menyelesaikan masalah yang ada. Penjabaran hasil penelitian ini merujuk pada teori Prof. Dr. M. Tahir Kasnawi, tentang perubahan sosial sudah cukup tepat terhadap hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada BEM FISIP dan BEM TEKNIK Universitas Mulawarman periode 2019-2020.

Kata Kunci : *Resistensi, Gerakan Mahasiswa, Komersialisasi, Pendidikan.*

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Vincents.siduppa@gmail.com

Pendahuluan

Gerakan mahasiswa merupakan sebuah bentuk perlawanan dari sekelompok mahasiswa yang memiliki wadah yang menaungi dan tidak, berkumpul dan bersatu dalam sebuah bentuk aksi sosial yang bersifat kolektif yang terorganisir terhadap pemegang kekuasaan yang dianggap membuat kebijakan jauh dari kebutuhan rakyat kebanyakan dan hanya mengakomodir sekelompok kecil yang melenceng dari kaidah-kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam dunia pendidikan yang ideal pendidikan hadir sebagai alat yang memiliki sifat kemanusiaan agar dikemudian hari menjadi kekuatan untuk penyadaran dan pembebasan umat manusia dari situasi ketertindasaan, tapi sekarang perlu dipahami bahwa pendidikan tidak lagi ada di posisi yang idealnya Pendidikan itu sendiri.

Pengorganisasian massa mahasiswa juga tidak bisa dikatakan instan karena setiap gerakan yang timbul tidak dapat dipisahkan dari situasi dinamis setiap negara dari pemerintah ke rakyat, khususnya Indonesia yang secara letak geografis berbentuk kepulauan, jadi dalam pengambilan kebijakan harus bisa mengakomodir segala kepentingan rakyat banyak yang tersebar. Keikutsertaan mahasiswa dalam mengontrol kebijakan dari pemangku kebijakan diaktualisasi sehingga dapat menginisiasi perubahan sosial apabila dirasa sudah tak relevan lagi untuk dijalankan. Setiap perjalanan bangsa merupakan sebuah lukisan yang dapat menghasilkan decak kagum dan tidak menutup kemungkinan menghasilkan cerita perih dan itu tidak dapat dihilangkan dari memori sejarah bangsa.

Sebagai bentuk antisipasi dari kemungkinan terburuk mahasiswa mengambil peran yang telah menjadi fungsi seperti mencipta dan menyebarkan kebudayaan tinggi (intelektualitas). Karena pada hakekatnya sebagai kelompok intelektual mahasiswa selalu diharapkan sebagai penyambung lidah rakyat untuk selalu terlibat aktif dalam segala situasi sosial, politik, ekonomi bangsa karena mahasiswa merupakan kelompok yang selalu bergelut dengan ilmu pengetahuan guna mencari kebenaran tapi dalam kenyataannya yang dihadapi sangat berbanding terbalik apabila melihat realitas di masyarakat. (TAUFIK, 2014)

Hanya sebatas pewarisan ilmu dari pendidik kepada muridnya, dan menghilangkan proses pendewasaan pemikiran secara kritis. Peserta didik hanya dijadikan wadah penerima guna dikemudian menjadi tenaga selanjutnya dengan konsep dan penerapan relatif sama. Menyebabkan situasi di lembaga pendidikan terkhusus pendidikan tinggi juga masih banyak implemtasi sistem belajar monolog dan jarang sekali melakukan dialog. Diperparah dengan lagi sistem yang telah terkapitalisasi menjadikan pendidikan yang berorientasi pada *capital* atau *profit orientid* dan bisnis. Maka jalannya pendidikan tidak dapat menjadi prioritas utama melainkan menfokuskan kepada untung dan rugi. Dalam sudut pandang marxis bahwa sejalan dengan makin matangnya kapitalisme, proses pemiskinan

golongan makin meningkat, dimana makin banyak bagian dari golongan borjuasi menjadi proletariat karena terjadi proses konsentrasi kapital/modal.

Dalam penerapan sistem kapitalisasi pendidikan khususnya di Universitas Mulawarman dilihat dari bentuknya yaitu: liberalisasi pendidikan, privatisasi pendidikan dan komersialisasi pendidikan.

Termasuk dalam urusan pembiayaan pendidikan yang sebagai konsekuensinya, Perguruan tinggi didorong untuk mencari pembiayaan sendiri melalui pengelolaan dana abadi, pembebanan biaya pendidikan pada mahasiswa, menciptakan badan usaha, dan kerjasama dengan swasta. Jadi tak heran lagi apabila dikampus ada rumah sakit dan tempat perbelanjaan di sekitar lingkungan kampus. Dan masuknya Indonesia sebagai keanggotaan WTO (*World Trade Organization*) yang juga menandai hadirnya GATS (*General Agreement on Trade in Services*) yang mengatur perkembangan pertukaran 12 bidang bantuan, termasuk: Layanan Kesehatan, layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan Akuntansi, layanan Pendidikan, dan berbagai layanan administrasi akan terus "ditaken" untuk segera melakukan pengaturan diambil dalam berbagai pertemuan dan kesepakatan tingkat yang tidak dapat disangkal yang mengendalikan masalah perdagangan yang efisien dalam tenaga kerja dan produk.

Akibat dari kewajiban Indonesia kepada WTO, yang juga dibuntuti oleh investasi dalam penandaan GATT (Pengertian WTO yang diidentikkan dengan pertukaran tenaga kerja dan produk), AFAS (*ASEAN Framework on Services*), menyiratkan bahwa Indonesia juga harus mengikatkan diri untuk mengambil kepentingan dalam babak tambahan yang mendorong negara-negara peserta untuk membuka sektor bisnis dalam negeri mereka lebih luas dan lebih cepat sehingga mereka dapat lebih mudah dijangkau oleh para pelaku industri dari berbagai negara, dan pada akhirnya menghilangkan semua batasan untuk pertukaran tenaga kerja dan produk. Sejak Indonesia menjadi individu dari WTO, tentu semua pengaturan yang diidentikkan dengan pertukaran multilateral telah ditegaskan ke dalam UU No. 7/1994 sebagai hal yang esensial agar lalu lintas pertukaran tenaga kerja dan produk dari Indonesia dapat bersaing dan diakui dalam perekonomian yang tidak diatur.

Pengaturan tersebut mengarahkan strategi pertukaran produk, administrasi, dan TRIPS (*Trade Related Intellectual Property Rights*) atau hak inovasi yang dilindungi yang diidentifikasi dengan pertukaran. Di bidang bantuan yang tergabung sebagai objek pedoman WTO semuanya merupakan produk bantuan, terlepas dari bidang pelatihannya. Dari kondisi di atas, cenderung terlihat bahwa signifikansi penyokong keuangan yang tidak dikenal bagi dunia pendidikan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah dengan alasan bahwa dunia pelatihan merupakan bidang bisnis yang sangat menggembirakan di kemudian hari.

Pertama, liberalisasi pendidikan yang merupakan alat pembebasan dan mengarahkan pendidikan kearah pasar bebas. dimana hal ini pemerintah sebagai fasilitator melepaskan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pendidikan untuk penerapan cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah kejatuhan Orde baru, seiring dengan angin liberalisasi yang sangat kencang, dunia pendidikan juga terkena dampaknya, ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi yang sangat kental kaitannya dengan liberasisi pendidikan mulai dari PP No.61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan tinggi sebagai Badan Hukum, lalu disusul UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan puncaknya UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan juga kebijakan kampus merdeka. Regulasi-regulasi itu mendesak Perguruan Tinggi berubah menjadi “Badan Hukum” yang dikelola layaknya Korporasi. Dengan jargon “Otonomi”, Perguruan tinggi dipaksa mandiri.

Kedua, Privatisasi Pendidikan, ketika pendidikan dijadikan kepemilikan pribadi maka lahirlah segala kebijakan. Pengelolaan dan hak dalam kepengurusan administrasi pendidikan diberikan sepenuhnya kepada pihak penyelenggara pendidikan (otonom). Kemudian instansi pendidikan akan berkompetisi untuk mencari dana dengan membuat usaha mandiri dan mencari dana talangan ke para pemodal untuk membiayai pendidikan, hal ini yang menyebabkan intervensi para lembaga keuangan seperti: WTO (*Word Trade Organisastion*), World Bank, CGI (*consultative group for indonesian*), IDB (*Islamic development bank*), ADB (*asian developmen bank*), IMF (*International monetary fund*) untuk ikut andil dalam terselenggaranya pendidikan di Indonesia.

Ketiga, Komersialisasi Pendidikan, dimaknai sebagai sebuah pengelolaan pendidikan yang menempatkan lembaga pendidikan sebagai institusi komersial. Sebagai lembaga komersial, maka lembaga pendidikan akan mengimplementasikan prinsip perilaku produsen, dalam literatur ekonomi liberal, tujuan produksi merupakan sebagai “*Profit Maximilizing*” dengan hal ini mengartikan bahwa secara finansial. Dan spesifik menjadikan instruksi sebagai mekanisme bisnis untuk produk barang yang dapat dipertukarkan. Ini akan membuat perbedaan dalam instruksi. Salah satu efek komersialisasi pengajaran adalah tawaran administrasi instruktif dan biaya sekolah yang meningkat. Jika ini terjadi, pendidikan lanjutan akan mendapat tempat hanya dengan sekelompok kecil orang yang memiliki uang berlimpah. Oleh karena itu, tidak aneh jika masih banyak anak-anak provinsi, keturunan buruh, peternak, dan orang-orang metropolitan yang tidak berdaya yang tidak bisa sekolah.

Dalam kaleidoskop tahun 2019 yang di keluarkan oleh lembaga pers mahasiswa Sketsa Unmul yang berjudul “Polemik, Drama, dan prestasi” dalam tulisan tersebut beberapa kasus yang terjadi dapat dijadikan rujukan bagaimana Universitas Mulawarman kasus komersialisasi pendidikan terjadi bulan juli perihal

pemunggutan uang SPI (Sumbangan pengembangan institusi). Memberikan beban tambahan kepada orang tua karena ada pembiayaan di luar UKT.

Dengan melihat fenomena diatas penulis tertarik dan mencoba melakukan observasi mengenai “Resistensi Gerakan Mahasiswa Terhadap Komersialisasi Pendidikan Di Universitas mulawarman. Secara spesifik FISIP (Fakultas ilmu social dan ilmu politik) dan FT (Fakultas Teknik) karena dalam kurung waktu 2019 – 2020” secara gerakan terlihat lebih mencolok dibanding dengan beberapa fakultas yang ada di Universitas Mulawarman guna melihat dari kedua Fakultas menanggapi komersialisasi.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Resistensi

“Resistensi merupakan bentuk aksi atau tindakan sesuatu tubuh menentang sesuatu, atau oposisi sosial atau *negativism* dalam menanggapi perintah, peraturan, kebijakan politik dan seterusnya.” Dalam pengertian yang lain resistensi diartikan sebagai respon perlawanan (baik secara pasif atau aktif) dari munculnya sautu kebijakan yang dirilis atau diterbitkan sautu pihak.

Shaul Oreg dalam jurnal Madyasti putri dan lisa widawati menyebutkan “resisten merupakan sebagai bentuk dari karakteristik individu yang mencerminkan pendekatan negatif terhadap perubahan dan kecenderungannya untuk menghindar atau menolak perubahan yang terjadi.” Untuk mendalami lagi tentang resistensi menjelaskan bahwa resistensi sebagai sikap negatif terhadap perubahan yang meliputi komponen psikologis berupa afektif, perilaku, dan kognitif.(Darmaningtyas, 2004)

Bentuk Resistensi

Dalam studi Scott dalam Andi Suriadi menyatakan bahwa “resistensi yaitu fokus pada bentuk-bentuk perlawanan yang sebenarnya ada dan terjadi disekitar sehari-hari, ia mendeskripsikan dengan jelas bagaimana bentuk perlawanan dalam masyarakat.” Mereka yang tidak punya kekuatan dalam melakukan penolakan terbuka ternyata mempunyai langkah sendiri dalam mengelak dan menghindar intervensi dari negara dan koorporasi. Menurut scott, “terdapat beberapa bentuk dari resistensi yaitu; Resistensi tertutup (simbolis atau ideologis) yaitu gosip, fitnah, penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan kepada masyarakat, serta penarikan kembali rasa hormat kepada penguasa.”

Resistensi yang terjadi di masyarakat merupakan sikap, perlawanan dari sautu faktor atau kondisi yang berbeda akibat; ketidaksukaan terhadap perubahan, kejutan dan ketakutan yang tidak diketahui, iklim kepercayaan, rasa takut akan kegagalan, kehilangan status dan *job security*, dan ketidaknyamanan pada ketidakpastian.

Gerakan Mahasiswa

Gerakan mahasiswa yang bertujuan untuk melakukan perubahan sosial dikutip dari teori yang dikatakan oleh Prof. Dr. M. Tahir Kasnawi, “perubahan sosial merupakan suatu proses perubahan atau modifikasi ataupun menyesuaikan yang berlangsung di dalam masyarakat yang bersangkutan dengan nilai-nilai budaya, pola perilaku kelompok masyarakat atau kelembagaan di dalam masyarakat baik dalam kehidupan material atau pun non material.”

Dikatakan oleh Prof. Dr. M. Tahir Kasnawi bahwa “pemuda menjadi inisiator dalam pergerakan untuk menuju suatu perubahan yang lebih baik. Menggunakan cara-cara yang non struktural (di luar lingkungan birokrasi pemerintahan) dalam upaya mencapai tujuannya”.

Menurut Tarrow dalam bukunya *Social Movements and Contentious Politics* (1998), adalah “tantangan kolektif yang dilakukan sekelompok orang yang mempunyai tujuan dan solidaritas yang serupa, dalam konteks interaksi konfrontatif melawan kelompok elite, lawan, dan penguasa.”

Pada hakekatnya, gerakan sosial merupakan jawaban spontan maupun terorganisir dari massa rakyat terhadap negara yang mengabaikan hak-hak rakyat, yang ditandai oleh penggunaan cara-cara di luar jalur kelembagaan negara atau bahkan yang bertentangan dengan prosedur hukum dan kelembagaan negara.

Komersialisasi Pendidikan

Merujuk pada salah satu literasi yang disampaikan oleh salah satu pemikir mengemukakan bahwa menguatnya sistem liberalisasi ekonomi negara dan menurunnya beberapa sektor di Indonesia memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melancarkan praktek sistem privatisasi Pendidikan. *Media Online Databoks* menyebutkan Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Kementrian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Ristek Dikti) pada tahun 2017, “Jumlah Perguruan Tinggi yang terdaftar mencapai 4.504 Unit. Angka ini di dominasi oleh perguruan Tinggi Swasta (PTS) mencapai 3.136 Unit, sedangkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi unit yang paling sedikit yaitu, 122 unit. Dan sisanya Perguruan Tinggi Agama dan Perguruan Tinggi dibawah Kementerian atau Lembaga negara dengan sistem kedinasan.”

Adapun istilah "komersialisasi pendidikan" saat ini mengacu pada dua pengertian yang berbeda, yaitu:

1. Komersialisasi pendidikan yang mengacu pada lembaga pendidikan dengan program serta perlengkapan mahal. Pada pengertian ini, hanya dapat dirasakan oleh sekelompok masyarakat yang secara finansial kuat, sehingga lembaga seperti ini tidak dapat disebut dengan istilah komersialisasi karena memang tidak memdagangkan pendidikan. Pemungutan biaya yang tinggi adalah “untuk memfasilitasi jasa pendidikan serta menyediakan infrastruktur pendidikan yang bermutu, seperti menyediakan fasilitas teknologi informasi,

laboratorium dan perpustakaan yang baik, serta memberikan kepada guru atau dosen gaji menurut standar.”

2. Komersialisasi pendidikan yang mengacu kepada lembaga pendidikan yang hanya mementingkan uang pendaftaran dan uang kuliah saja, namun mengabaikan kewajiban-kewajiban pendidikan. Hal ini jelas tercantum pada Undang-Undang N0.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 1 yang berbunyi: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara”.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Definisi metode penelitian kualitatif yaitu “metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”, Bog dan Taylor (dalam Moleong : 2014). Data yang dihasilkan dari metode ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam resistensi Gerakan Mahasiswa terhadap komersialisasi pendidikan.

Hasil Penelitian

Strategi dan Taktik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai Inisiator Gerakan

Dalam jurnal karya lucky a attamimi yang berjudul “*Resistensi Warga Pinggir Rel Surabaya (Studi Deskriptif Resistensi Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya Terhadap Pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya)*” mengutip dari Teori Resistensi Menurut Scott, tujuan resistensi dimaksudkan untuk memperkecil atau menolak sama sekali klaim-klaim yang diajukan kelas-kelas dominan atau mengajukan klaim-klaim mereka sendiri dalam menghadapi kelas dominan. Kesadaran kolektif yang dimiliki mahasiswa dari Universitas Mulawarman sehingga membentuk suatu gerakan perlawanan yang memunculkan suatu tuntutan. (Rifqi Suharto, 2020)

Menurut teori yang dikemukakan Scott diatas, resistensi yang dilakukan para mahasiswa di universitas mulawarman terkhususnya mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dan mahasiswa fakultas teknik, akan melewati serangkaian tahapan-tahapan atau fase-fase tertentu. Fase-fase tersebut ialah : 1. Fase pergerakan 2. Fase membangun kesadaran 3. Fase membangun Gerakan 4. Fase mempengaruhi kelompok sasaran.

Fase Pergerakan

Fase ini merupakan sautu fase yang harus ada di sautu lingkungan kampus itu sendiri munculnya kegelisahan dan keresahan mahasiswa di universitas dari masa ke masa. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merupakan satu kampus yang sangat konsen dalam membangun gerakan-gerakan perlawanan sejak lama. Semangat dalam membangun gerakan tetap akan berlanjut kepada mahasiswa baru. Mulawarman dengan adanya kebijakan kampus yang erat kaitannya dengan pola komersialisasi ciri telah muncul dengan adanya pembayaran ukt secara penuh, isu SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi), pungutan liar Almamater kampus . Hal demikian juga dikemukakan oleh wakil presiden BEM FISIP, saudara Musllan yang mengatakan bahwa:

“Gerakan ini bukan sekedar gerakan tahunan yang hanya akan terjadi pada saat dekat waktu pembayaran semesteran tapi akan tetap terjadi dikala dimana ada situasi mendesak yang bersangkutan dengan jalannya pendidikan dari segala sektor” (wawancara 25 Januari 2022)

Hal tersebut mengakibatkan kegelisahan kepada mahasiswa yang sedang aktif menuntut pendidikan di universitas mulawarman. Ini menjadi dasar BEM FISIP dan BEM TEKNIK untuk bergerak menindak lanjuti situasi sebagaimana peran organisasi mahasiswa sebagai wadah untuk melindungi dan mencari solusi supaya mendapatkan jalan keluar yang tidak merugikan mahasiswa itu sendiri dan juga pihak birokrasi kampus.

Fase Membangun Kesadaran

Pada fase ini, beberapa Badan Eksekutif Terlibat membantu membangun kesadaran mahasiswa. Namun pada situasi dilapangan yang terlihat lebih menonjol dalam melakukan pergerakan hanya BEM FISIP dan BEM TEKNIK itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Presiden BEM FISIP periode 2019-2020 saudara Rezky (Are) mengatakan:

“Kesadaran ini tak lepas dari dukungan senior dan Presiden BEM FISIP periode sebelumnya yang telah diajarkan sehingga dalam membangun kesadaran telah menjadi keyakinan diri itu sendiri, dan akan tetap berlanjut kegenerasi selanjutnya.”

Mengenai hal tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan Musllan yang mengatakan bahwa:

“Sebagai mahasiswa FISIP tidak boleh tabuh dengan namanya gerakan sosial karena gerakan sosial telah menjadi sautu praktek nyata yang diajarkan di dalam ruang kelas, maka sayang sekali ilmu yang diajarkan oleh dosen apabila mahasiswa menjadi mahasiswa yang anti organisasi.”

Menyadari situasi tersebut BEM FISIP dan BEM TEKNIK semakin menunjukkan kesoliditan dalam mengawal segala isu yang dapat merugikan mahasiswa hak mahasiwa itu sendiri. dalam menyelesaikan permasalahan ini

beberapa hal-hal yang dilakukan oleh BEM FISIP dan TEKNIK adalah Pertama, dalam melakukan mobilisasi, terdapat pemimpin yang kharismatik untuk mendukung proses penggemblengan individu yang bergabung sehingga mereka berani melakukan langkah-langkah yang diarahkan pemimpinnya dalam suatu gerakan resistensi. Kedua, dalam melakukan proses resiolisasi, terdapat pemimpin untuk membangun keyakinan diri atau kepercayaan diri anggota kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menjelaskan bahwa dalam membangun kesadaran berorganisasi tidak lepas dari kontribusi nyata dari para senior dan juga para dosen sebagai kakak ataupun orang tua yang ada di kampus, selain itu dalam membangun gerakan solid sangat diperlukan Sumber daya manusia yang secara kualitas pemikiran yang progresif.

Fase Membangun Gerakan

Fase ini meliputi pengorganisasian gerakan, perumusan tujuan dan strategi mobilisasi aksi. Fase ini dilalui dengan melakukan rapat dengan anggota untuk merumuskan taktik perlawanan, tuntutan, dan penentuan hari dalam melakukan aksi perlawanan. Akhirnya pada pertemuan 15 Juni-10 Juli 2020 hasil diskusi konsolidasi BEM yang tergabung dalam aliansi UNMUL Gawat Darurat (UGD) secara Online menghasilkan tujuan untuk memaksimalkan kerja-kerja di fakultas masing-masing dikarenakan tidak bisa memberikan pressure bersama karena situasi pandemi masih besar, meskipun dalam gerak terpecah tapi dalam koordinasi tetap terarah secara baik. Untuk menjaga kesolidan dalam gerak jadi seluruh BEM memberikan setiap perwakilan untuk menjadi koordinator inti

Fase Mempengaruhi Kelompok Sasaran

Pada fase ini tugas dari BEM sebagai Inisiator gerakan adalah mempengaruhi seluruh pihak massa mahasiswa sehingga menjadi partisipan dan mendorong partisipan pasif menjadi kekuatan aktif. Fase ini ditunjukkan dengan kegiatan pemasangan spanduk propaganda terhadap isu yang lagi hangat, penggalangan tanda tangan dukungan dan membagikan selebaran kepada pengguna jalan di lingkup Universitas Mulawarman. Kegiatan ini dimulai membaca segala pernyataan mahasiswa yang didapat melalui kuisisioner yang telah BEM berikan sehingga hasil dari itu BEM yang ada di Universitas Mulawarman langsung menghadap ke pihak Birokrasi kampus untuk membahas jalan keluar untuk permasalahan yang dihadapi mahasiswa yang diperparah oleh Pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh dunia. BEM Fakultas yang ada di Universitas Mulawarman terkhusus BEM FISIP dan BEM Teknik juga melakukan Pressure atau tekanan yang lebih dengan membuat beberapa banner sebagai bentuk perlawanan selanjutnya.

Dalam melakukan gerakan mahasiswa sangatlah diutamakan kepekaan sosial agar gerakan yang dilakukan tidak menjadi sia-sia hal ini sesuai dengan

yang dikatakan oleh Prof. Dr. M. Tahir Kasnawi, tentang perubahan sosial merupakan suatu proses perubahan atau modifikasi ataupun menyesuaikan yang berlangsung di dalam masyarakat yang bersangkutan dengan nilai-nilai budaya, pola perilaku kelompok masyarakat atau kelembagaan di dalam masyarakat baik dalam kehidupan material atau pun non material. agar benturan sosial budaya tidak terjadi.

Sesuai gerakan yang dilakukan oleh BEM FISIP merupakan bentuk dari manifestasi dari Resistensi semi terbuka karena sistematis dan ideologis telah dilakukan secara kolektif yang terorganisasi yang mempunyai ruang yang lebih kompleks.

Strategi dan Taktik Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik sebagai Inisiator Gerakan

Untuk mengidentifikasi masalah, harus menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan UKT seperti subsidi silang yang masih bermasalah, pengelolaan, dan sebagainya. Seperti yang dikatakan Presiden BEM Teknik Nur Aisyah saat penulis melakukan penelitian dilapangan:

“semua kebijakan yang hadir jangan langsung main tolak atau terima kita sebagai mahasiswa sudah dan sepiantasnya melakukan indentifikasi atau membedah secara utuh kebijakan agar dapat dilihat manakah kebijakan yang menguntungkan dan merugikan mahasiswa Teknik” (wawancara pada 14 februari 2022)

Fase Kajian, fase ini memerlukan respon yang baik dari mahasiswa BEM Teknik. Nur Aisyah juga menyampaikan hal serupa yaitu:

“saya sangat bersyukur karena mahasiswa fakultas Teknik sangat mensupport seluruh program kerja yang dijalankan oleh BEM Teknik, hamper seluruh elemen mahasiswa mengikuti setiap proses dalam fase pergerakan ini meskipun dalam keadaan Covid-19” (wawancara pada 14 februari 2022)

Kemudian fase eksekusi. Fase ini merupakan bentuk implementasi dari peran mahasiswa yaitu *Agent of change*. BEM. Sesuai wawancara dengan Presiden BEM Teknik Nur Aisyah juga menyampaikan:

“BEM Teknik sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan semua fase sesuai pengetahuan kami meskipun kedepannya ada kekurangan dalam gerak kami, maka akan kami evaluasi agar gerakan mahasiswa tetap ada yang namanya perbaikan dan agar terciptanya dialektika dalam gerakan.” (wawancara pada 14 februari 2022)

Terakhir, fase evaluasi. Fase ini merupakan finalisasi dari semua gerakan atau fase yang telah dilakukan oleh BEM Teknik fase ini dilakukan guna melihat semua kekurangan dalam gerakan agar gerakan yang akan dilakukan kedepannya bisa lebih baik lagi. Nur Aisyah sebagai Presiden BEM Teknik menerangkan:

“Bahwa dalam setiap gerakan tidak luput dari namanya evaluasi karena tidak ada gerakan yang sempurna, pasti ada saja kekurangan atau kelalaian yang terjadi. Di fase evaluasi ini kita belajar melihat kekurangan kita dalam gerak sehingga selanjutnya kekurangan dapat diperbaiki.” (wawancara pada 14 februari 2022)

Menurut Prof. Dr. M. Tahir Kasnawi, perubahan sosial juga membutuhkan sebuah modifikasi agar gerakan sosial yang bertujuan untuk melakukan perubahan sosial tidak terlihat monoton agar interaksi aktor gerakan dan massa tetap berjalan dengan baik. Secara keseluruhan BEM FISIP dan BEM Teknik dalam Resistensi tidak jauh berbeda karena BEM Teknik memakai Resistensi Semi Terbuka.

Faktor Penghambat Dan Pendukung Resistensi Gerakan Terhadap Komersialisasi Pendidikan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatan resistensi pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sesuai hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Presiden BEM FISIP adalah:

“yang menjadi faktor penghambat daalam melaksanakan resistensi pendidikan salah satunya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pelaksanaan gerak dalam organisasi sangat terbatas sehingga, BEM FISIP hanya melakukan gerakan semaksimal mungkin ditengah Pandemi yang terjadi padahal kebijakan mengenai pendidikan yang muncul saat itu memberatkan mahasiswa.” (wawancara 25 januari 2022)

Seperti yang dikatakan oleh Musllan wakil presiden BEM FISIP mengenai faktor penghambat yang dialami BEM FISIP adalah:

“Pandemi yang terjadi diseluruh belahan dunia mengakibatkan seluruh gerakan rakyat maupun mahasiswa terhambat secara gerak contohnya berkumpul bersama yang membuat kerumunan, sehingga memberikan efek besar karena tidak bisa berdiskusi apalagi melakukan demonstrasi besar kemungkinan besar akan mendapatkan tindakan represif dari aparat seperti saat demonstrasi penolakan Omnibuslaw 2020. Ditambah lagi harus kembali ke kampung halaman yang membuat memobilisasi mahasiswa juga terhambat. (wawancara 25 januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menjelaskan bahwa faktor utama yang menjadi penghambat adalah bagaimana Pandemi Covid-19 menghancurkan langgam gerak mahasiswa dalam membangun gerakan resistensi. Di sisi lain berdasarkan hasil wawancara dengan wakil presiden diketahui bahwa salah satu faktor penghambat dalam membangun gerakan ialah faktor massa yang tidak di samarinda jadi memobilisasi menjadi sangat susah dan apabila dipaksakan melakukan gerak secara kuantitas massa kurang.

Jadi sebaiknya dalam melakukan gerakan sosial yang sadar diutamakan adalah memahami terlebih dahulu situasi yang terjadi agar menjadi gerakan yang tidak menjadi gerakan yang mengambang.

Faktor Penghambat Dan Pendukung Resistensi Gerakan Terhadap Komersialisasi Pendidikan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatan resistensi pendidikan di Fakultas Teknik sesuai hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Presiden BEM Teknik adalah:

“yang menjadi faktor penghambat daalam melaksanakan resistensi pendidikan salah satunya Pandemi Covid-19 dan perkuliahan yang dilaksanakan secara daring yang mengakibatkan pelaksanaan gerak dalam organisasi sangat terbatas sehingga, BEM Teknik telah melakukan gerakan semaksimal mungkin ditengah Pandemi yang terjadi padahal kebijakan mengenai pendidikan yang muncul saat banyak diposisi yang memberatkan mahasiswa.” (wawancara 14 februari 2022)

Penulis dapat menjelaskan bahwa faktor utama yang menjadi penghambat adalah bagaimana Pandemi Covid-19 menghancurkan langgam gerak mahasiswa dalam membangun gerakan resistensi. Di sisi lain berdasarkan hasil wawancara dengan wakil presiden diketahui bahwa salah satu faktor penghambat dalam membangun gerakan ialah faktor massa yang tidak di samarinda jadi memobilisasi menjadi sangat susah dan apabila dipaksakan melakukan gerak secara kuantitas massa kurang. Ditambah kebijakan PSBB yang berlaku saat itu membuat setiap gerakan yang ada sangat besar kemungkinan akan mendapatkan tindakan represif dari aparat dengan alasan peraturan tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Gerakan mahasiswa yang ada tidak lepas dari bagaimana para senior terdahulu berperan mahasiswa dari generasi ke generasi untuk membantu membangun kesadaran perlawanan atas kebijakan yang ada. Generasi terdahulu dapat menjadi tolak ukur untuk membangun gerakan perlawanan.
2. Dalam membangun ekskalasi gerakan di Universitas Mulawarman BEM FISIP dan BEM TEKNIK tergabung dalam Aliansi Unmul Gawat Darurat dan Aliansi Nasional Mahasiswa dikampus yang lain.
3. Gerakan Mahasiswa yang di inisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik dan FISIP merupakan salah satu contoh bagaimana salah satu subjek mahasiswa dan gerakan mahasiswa tetap akan membentuk subjek lain dari mahasiswa untuk membangun gerakan mahasiswa yang terintegrasi satu sama lain. Fase dalam membangun gerakan antara BEM FISIP dan BEM

TEKNIK secara teoritis dan praktek hampir sama yang membedakan hanya kuantitas massa.

4. Faktor pendukung dan penghambat dalam membangun eskalasi gerakan BEM FISIP dan BEM TEKNIK secara garis besar sama mulai dari birokrasi tidak memberikan jalan keluar ditambah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan yang dinilai juga tidak menyelesaikan masalah yang ada.
5. Penjabaran hasil penelitian ini merujuk pada teori Prof. Dr. M. Tahir Kasnawi, tentang perubahan sosial sudah cukup tepat terhadap hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada BEM FISIP dan BEM TEKNIK Universitas Mulawarman periode 2019-2020.

Saran

1. Dalam membangun eskalasi gerakan penulis mengharapkan kepada pembaca dan aktivis supaya berperan aktif di setiap gerakan atau organisasi yang diikuti agar kita teliti menganalisis setiap kebijakan yang dikeluarkan dilingkungan Kampus
2. Berkenaan dengan eskalasi gerakan yang berbeda latar belakang tapi dengan tujuan yang sama agar selalu bersatu dalam gerak dan tetap menjunjung kesolidaritasan mahasiswa.

Daftar Pustaka

- Darmaningtyas. (2004). *Pendidikan yang Memiskinkan*. Galang Press.
- Rifqi Suharto, M. F. (2020). Gerakan Tani Muda Santan: Melawan Industri Pertambangan Dan Membangun Ekonomi Tanding. *EJournal Pembangunan Sosial*, 8(4). <https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=9361>
- TAUFIK, M. (2014). RESISTENSI GERAKAN MAHASISWA TERHADAP KAPITALISASI PENDIDIKAN (Studi Organisasi Eksternal Kampus di Unesa). *Paradigma*, 2(3). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/9461>
- Darmaningtyas, (2004). *Pendidikan yang Memiskinkan*, Yogyakarta: Galang Press,
- Bogdan, Robert dan Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Terjemahan oleh Arief Rurchan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1992).
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

DOKUMEN :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 *Tentang Penetapan perguruan Tinggi sebagai badan hukum*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang sistem pendidikan nasional*

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 *Tentang Pendidikan Tinggi*
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 *tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*

Laporan Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2020

Laporan Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Periode 2019-2020

JURNAL :

Moh. Taufik. 2014. eJournal “Resistensi Gerakan Mahasiswa terhadap Kapitalisasi Pendidikan (Studi Organisasi Eksternal Kampus di Unesa)”

Moh. Faridzul rifky. 2020. eJournal “Gerakan Tani Muda Santan Perlawanan Industri Pertambangan dan Membangun ekonomi Tandingan”

eJournal Equilibrium ”Pendidikan Sosiologi Vol. IV No. 2 November 2012 ISSN e-2477-2021 p-2339-2401”

SUMBER INTERNET:

<https://www.sketsaunmul.co/berita-kampus/kaleidoskop-unmul-2019-polemik-drama-dan-prestasi/baca> diakses pada 28 Januari 2021 Pukul 22.10

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/05/berapa-jumlah-perguruan-tinggi-di-indonesia> diakses pada 28 Januari 2021 Pukul 23.23